



## KELOMPOK KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

**Muhammad Hanri,**  
Ph.D.  
hanri@lpem-feui.org

**Nia Kurnia Sholihah, S.E.**  
nia.kurnia@lpem-  
feui.org

## DAFTAR ISI

Kaleidoskop  
Ketenagakerjaan dan  
Perlindungan Sosial – 1

Outlook  
Ketenagakerjaan 2022 –  
3

## RINGKASAN

**B**erbagai peristiwa mewarnai tahun 2021 yang menjadi tahun kedua pandemi COVID-19, termasuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Beberapa indikator ketenagakerjaan mengalami peningkatan, meskipun penurunan juga terjadi untuk indikator-indikator lain. Refleksi peristiwa, kebijakan, dan capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang terjadi pada tahun 2021 menjadi salah satu langkah untuk mengambil pelajaran baik dan mengevaluasi implementasi perencanaan di bidang ini sebagai catatan untuk memulai tahun yang baru.

### Kaleidoskop Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial

Akhir tahun 2021 menjadi waktu yang tepat untuk melihat kembali sejenak peristiwa yang terjadi dan isu yang muncul sepanjang tahun 2021. Berbagai penyesuaian masih dilakukan dalam tatanan ekonomi dan sosial akibat pandemi yang sudah memasuki tahun ke-2, tidak terkecuali dalam hal terkait dengan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang mana cukup besar terdampak akibat pandemi. Berikut adalah beberapa *highlight* yang dapat LPEM FEB UI rangkum.

- Kabar baik membuka tahun 2021 dengan pencapaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia pada tahun 2020 yang dilaporkan meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IPK Indonesia memang menunjukkan trend positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Prestasi tersebut dapat ditingkatkan dengan capaian pada tahun 2020 yang membuat Indonesia masuk dalam kategori menengah atas dengan IPK tercatat sebesar 67,64. Dibandingkan tahun 2019, angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 6,58 poin. Peningkatan IPK Indonesia 2020 tersebut didorong kuat oleh semakin tingginya inisiatif pemerintah daerah dalam perencanaan daerah terkait dengan ketenagakerjaan. Peningkatan ini juga didorong oleh pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas yang semakin baik. Di level daerah, tercatat bahwa provinsi dengan IPK lebih dari 66,00 meningkat menjadi sebanyak 23 provinsi, dari sebelumnya hanya ada 7 provinsi pada tahun 2019.
- Kabar baik di tengah pandemi selanjutnya muncul dari lebih rendahnya jumlah jumlah orang miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada awal 2021 berdasarkan data yang dikeluarkan Juli 2021 oleh BPS. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut tercatat sebesar 10,4%, sedangkan angka ketimpangan (*gini ratio*) juga menurun menjadi 0,384. Kedua indikator tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan periode September 2020. Selain itu, TPT pada Februari 2021 sebesar 6,26% juga tercatat menurun dibandingkan dengan Agustus

2020. Perbaikan ini disinyalir merupakan dampak baik dari realisasi PEN yang cukup baik di akhir 2020 yang efek penggandanya dirasakan pada awal 2021 meskipun angka positif COVID-19 masih tinggi dan terdapat kebijakan-kebijakan pembatasan sosial.

Meskipun demikian, kondisi krisis kesehatan yang belum relatif membaik dan kebijakan PSBB di paruh awal 2021 membuat kondisi pekerja pada periode tersebut mengalami *worse-off*. Hal ini dapat dilihat dari penurunan rata-rata jam kerja yang berimplikasi pada penurunan rata-rata upah yang diterima oleh pekerja. Pada Februari 2021, rata-rata jam kerja tercatat menjadi sebanyak 39 jam per bulan atau menurun 7% (*yoy*). Penurunan rata-rata jam kerja ini juga sedikit banyak menunjukkan pengaruh dari adanya pembatasan kegiatan ekonomi akibat adanya pandemi dan pengaruh pandemi terhadap perubahan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di sisi lain, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja dalam satu bulan adalah sebesar Rp2,57 juta, yang mana menurun sebesar 3% (*yoy*).

- Pada pertengahan 2021, pemerintah menetapkan PPKM Darurat sebagai bagian dari upaya untukantisipasi penyebaran varian Delta sehingga banyak kegiatan masyarakat yang terdampak seperti pembatasan jumlah orang yang bekerja di perkantoran, pembatasan perjalanan transportasi umum, penutupan fasilitas umum, sampai dengan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan terutama di Jawa dan Bali yang angka peningkatan kasus akibat varian Delta cukup tinggi. Kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar terutama bagi masyarakat yang bekerja di bidang tersebut, salah satunya adalah tenaga kerja di pusat perbelanjaan/mall. Berdasarkan estimasi menggunakan data Sakernas Agustus 2020, LPEM FEB UI memperkirakan jumlah pekerja terdampak PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada saat itu adalah sekitar 63 ribu orang yang bekerja di bioskop dan 3,2 juta pekerja di mall/ruko.
- Dipicu dengan ada PPKM Darurat ini, kondisi ketenagakerjaan kembali mengalami penurunan pada paruh kedua tahun 2021. Berdasarkan BRS November 2021, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran secara nasional meningkat menjadi sebesar 6,49% pada Agustus 2021 dibandingkan dengan Maret 2021 (6,26%). TPT lebih tinggi terjadi di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan dan lebih banyak di kalangan pria dibandingkan dengan wanita.
- Kabar baik kembali datang pada semester kedua 2021. Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah dan Presiden G20 pada tahun 2022 nanti. Penetapan ini dianggap akan menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam negeri seiring dengan negara-negara anggota lainnya. Isu mengenai ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian khusus yang akan didiskusikan dalam forum negara-negara penyumbang PDB terbesar dunia ini. Melalui *Employment Working Group (EWG)*, dengan tajuk *Improving the Employment Condition to Recover Together*, Indonesia akan mengangkat tema pemulihan aspek ketenagakerjaan di masa pandemi. Isu prioritas yang akan dibahas, yaitu: (1) penciptaan lapangan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja; (2)

pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas; (3) pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas berkelanjutan; serta (4) perlindungan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Indonesia secara khusus menekankan pentingnya pasar tenaga kerja inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu isu prioritas yang akan dibawa pemerintah Indonesia melalui EWG.

- Menjelang akhir tahun, muncul beberapa perkembangan terkait regulasi dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Yang pertama adalah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi *omnibus law* Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghasilkan bahwa UU tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan status UU Cipta Kerja (penggabungan UU baru atau revisi) dan azas keterbukaan pada publik yang kurang terpenuhi dalam proses penyusunannya. Putusan ini diikuti dengan penangguhan tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta penerbitan peraturan pelaksana baru dari omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja.
- Menjelang akhir tahun, pemerintah memutuskan bahwa pada tahun 2022 nanti, upah minimum secara rata-rata nasional akan naik sebesar 1,09%. Berdasarkan teori pasar tenaga kerja, di mana penerapan upah minimum (*ceteris paribus*) akan memiliki korelasi positif terhadap tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan provinsi-provinsi tertentu agar pengangguran tidak meningkat lebih tinggi lagi dengan mempertimbangkan seberapa elastis permintaan tenaga kerja (yang berasal dari perusahaan dan pemberi kerja) terhadap perubahan biaya mempekerjakan pekerja (yang tercermin dari peningkatan UMP).
- Terkait dengan perlindungan sosial, pada tahun 2021 tercatat bahwa realisasi PEN di bidang ini sebesar Rp186,64 triliun. Alokasi paling besar adalah untuk program kartu sembako (Rp48,69 triliun), BLT Desa (Rp28,8 triliun), dan Program Keluarga Harapan (Rp 28,31 triliun). Realisasi PEN ini menunjukkan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19.

## Outlook Ketenagakerjaan

Pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN di tahun 2022 dengan menganggarkan sebesar Rp321,2 triliun dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.939,3 triliun. Alokasi anggaran program untuk klaster kesehatan sebesar Rp77,05 triliun, perlindungan sosial Rp126,54 triliun, program prioritas Rp90,4 triliun dan dukungan UMKM Rp27,48 triliun.

Sementara itu, program PEN untuk klaster perlindungan sosial dialokasikan untuk 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebesar Rp 28,7 triliun; 18,8 juta penerima manfaat program Kartu Sembako sebesar Rp 45,1 triliun; Kartu Prakerja

sebesar Rp 11 triliun; jaminan kehilangan pekerjaan sebesar Rp5,6 triliun; dan anggaran cadangan perlindungan sosial sebesar Rp 36,1 triliun.

Dari sisi ketenagakerjaan, untuk mencegah berkurangnya lapangan usaha, pemerintah juga telah menganggarkan berbagai insentif. Beberapa di antaranya adalah stimulus UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka PEN; Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN; dan Program Padat Karya Infrastruktur.

Berbagai stimulus di atas diharapkan turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai katalisator permintaan sisi tenaga kerja. Sejalan dengan itu, dengan mempertimbangkan telah keluarnya Indonesia dari resesi ekonomi pada Q3 tahun 2021, dan seiring kembali pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat, Divisi Kajian Makroekonomi LPEM FEB UI juga telah memprediksikan bahwa ekonomi akan tumbuh pada 3,7% - 3,9% untuk tahun penuh 2021, dan 5,1% - 5,4% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi tersebut penting bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sehingga diharapkan TPT tidak akan lebih buruk dibandingkan kondisi Agustus 2021. Hal tersebut, ditambah dengan serapan dana PEN klaster perlindungan sosial yang baik di tahun 2021 dan masih terdapat anggaran yang cukup besar pada tahun 2022, tingkat pengangguran dan ketimpangan juga diperkirakan dapat mengalami perbaikan dibandingkan kondisi terakhir di bulan Maret 2021.

#### Referensi:

- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3532/upaya-pemerintah-melalui-program-pemulihan-ekonomi-nasional-telah-on-track-dan-akan-dilanjutkan>
- <https://www.lpem.org/macroeconomic-analysis-series-indonesia-economic-outlook-2022/>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/putusan-mk-omnibus-law-uu-112020-cipta-kerja-inkonstitusional-ini-penyebabnya>
- <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/infografis-perlindsos2021>

